



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : RSJD dr. ARIF ZAINUDIN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : KHUSNUL ANWAR
2. Jabatan : WAKIL DIREKTUR UMUM DAN KEUANGAN
3. NHK : 222946

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 340.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 108 m²/70 m² di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000
2. Tanah Seluas 44 m² di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
3. Tanah Seluas 268 m² di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 61 m²/61 m² di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 526.900.000

1. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 1.900.000
3. MOBIL, SUZUKI MINIBUS Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
4. MOBIL, INOVA ZENIX SUV Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 430.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 21.045.000

D. SURAT BERTHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 86.751.898

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 974.696.898



III. HUTANG

Rp. 375.000.050

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 599.696.848

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.